



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Dinas Perhubungan Kota Pontianak

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak. dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RPD) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan laporan ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak oleh pihak lain yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban, serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu dalam merwujudkan "*clean government* dan *good governance*".

Pontianak, 9 Januari 2026

**Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pontianak**



H. Y. TRISNA IBRAHIM, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710719 199803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Gambaran Umum	I-1
B. Permasalahan Utama (Strategic Isuued)	I-9
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. RENSTRA	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-5
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
B. Realisasi Anggaran	III-47
BAB IV : PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pontianak yang melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan serta tugas desentralisasi Pemerintah Kota Pontianak, yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah tepatnya pada Pasal 13 ditetapkan Pembentukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2005.

Dalam penilaian dan evaluasi yang dilakukan dengan pengukuran keberhasilan maupun kegagalan masih sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan ini diantaranya disebabkan masih lemahnya data yang ada dan pengukuran kinerja selama ini lebih ditekankan pada kemampuan dalam menyerap dana/anggaran.

Oleh karena itu perlu disusun suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektifitas dari aktifitas pencapaian Kinerja Dinas. Untuk mengukur kinerja ini maka seluruh aktifitas harus dapat diukur dari sisi input (masukan) dengan penekanan pada proses, keluaran, manfaat dan dampak dari program yang dibuat. Melalui pengukuran kinerja ini keberhasilan akan dapat dilihat dari kemampuan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris Dinas

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran
2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

d. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan

1. Kepala Seksi Pembangunan dan Operasional
2. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan

e. Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan

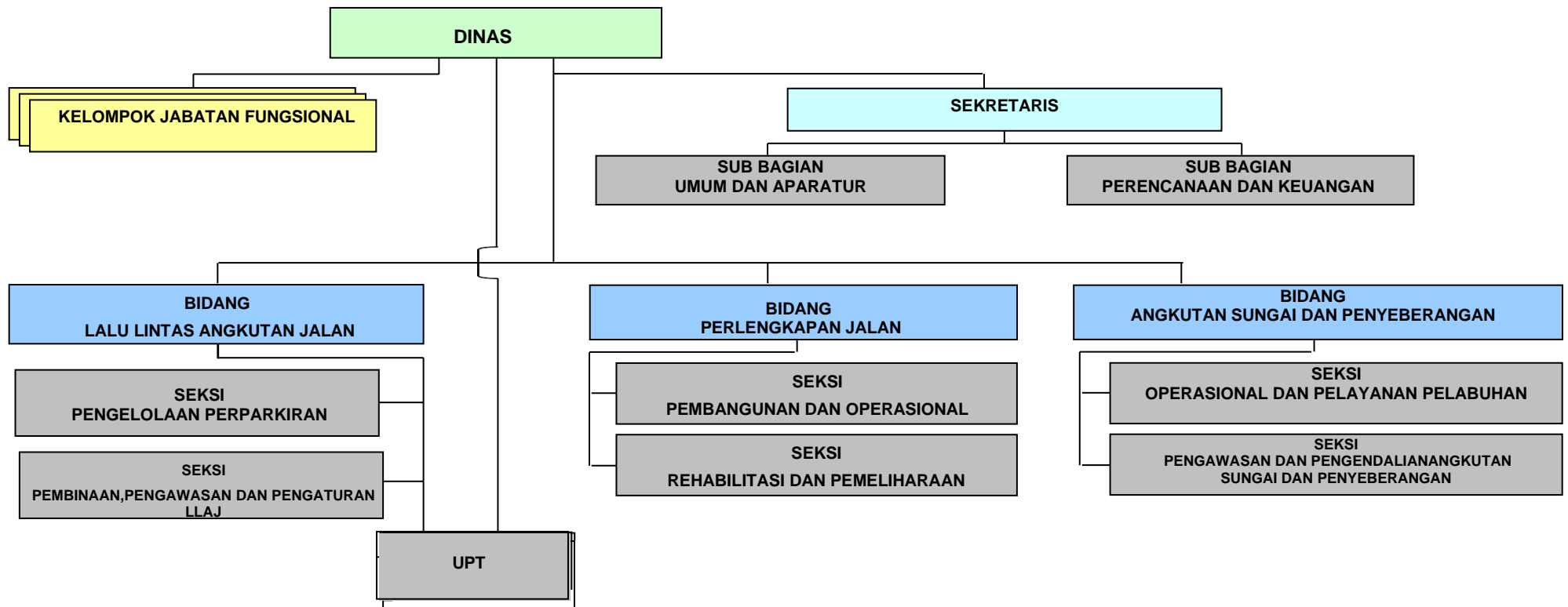
1. Kepala Seksi Operasional dan Pelayanan Pelabuhan
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan

f. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK
PERWA NOMOR 123 TAHUN 2021



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak, bahwa Kepala Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Perhubungan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. Perumusan program dan rencana kerja dibidang perhubungan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang perhubungan;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi perizinan dibidang perhubungan;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang perhubungan yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPT serta masing-masing Kasubbag dan Kasi.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai agar kegiatan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada kinerja suatu instansi pemerintah.

Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Non Apartur Sipil Negara (Non ASN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga Staf.

Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak didukung oleh 124 orang personil, yang terdiri dari 51 orang PNS, 15 orang CPNS, 25 orang PPPK dan

33 orang Non ASN. Komposisi personil Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tahun 2025 ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak

NO	GOL/ RUANG	JUMLAH PNS (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	IV/c	1	-	1
2	IV/b	-	-	-
3	IV/a	4	1	5
4	III/d	7	4	11
5	III/c	2	3	5
6	III/b	5	3	8
7	III/a	7	2	9
8	II/d	10	-	10
9	II/c	1	-	1
10	II/b	1	-	1
11	II/a	-	-	-
JUMLAH		38	13	51

Formasi Kepangkatan Pegawai
Dinas Perhubungan Kota Pontianak

NO	GOL/ RUANG	JUMLAH PNS (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	IV	5	1	6
2	III	21	12	33
3	II	12	-	12
4	I	-	-	-
JUMLAH		38	13	51

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	38	13	51
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	10	5	15
3	Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK)	21	4	25
4	Non ASN	30	3	33
JUMLAH		99	25	124

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI PNS (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	Magister (S-2)	5	3	8
2	Sarjana (S-1)	10	7	17
3	Diploma IV (D-4)	1	-	1
4	Sarjana Muda (D-3)	4	1	5
5	Sarjana Muda (D-2)	2	-	2
6	SMA / Sederajat	16	1	17
7	SMP / Sederajat	1	-	1
8	SD	-	-	-
JUMLAH		39	12	51

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan khusus bidang Perhubungan maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III,D-IV, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 56.160.831.132 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran
1	Belanja Operasi	45.768.997.603
	- Belanja Pegawai	10.840.747.502
	- Belanja Barang dan Jasa	34.928.250.101
2	Belanja Modal	10.391.833.529
	<i>Jumlah</i>	<i>56.160.831.132</i>

6. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diemban dan tentunya kedepan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Pontianak diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional lapangan baik roda dua, empat, dan roda enam guna mendukung pengawasan dan patroli, pemeliharaan PJU serta peningkatan sarana dan prasarana UPT berupa sarana mobilitas, sarana efisiensi kerja dan prasarana kantor serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap.

**DAFTAR PRASARANA/ASET TANAH
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal - Usul	
					Hak	Sertifikat			
						Tanggal			Nomor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah Perkantoran Dishub	4,500		Jl. Alianyang Ptk		7 Des 2000	196	Gedung Kantor	
2	Tanah Perkantoran PKB			Jl. Khatulistiwa Ptk				Gedung Kantor	
3	Terminal Batulayang	9.135		Jl. Khatulistiwa Ptk				Terminal	
4	Terminal Siantan	1.777		Pasar Siantan				Terminal	
5	Terminal Seruni	1.023		Pasar Seruni				Terminal	
6	Terminal Parit Mayor	525						Terminal	
7	Terminal Dahlia	691		Jl.				Terminal	
8	Terminal Nipah Kuning	855		Jl Komyos Sudarso				Terminal	
9	Terminal Pal V	745		Jl. Gusti Hamzah				Terminal	
10	Terminal Kemuning	375		Jl. Prof. M. Yamin				Terminal	
11	Terminal Soedarso	1.166						Terminal	
12	Terminal Harapan Jaya	2.025						Terminal	

**DAFTAR KENDARAAN DINAS PENUNJANG OPERASIONAL LAPANGAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK**

No. Urut	Nama / Jenis Kendaraan	Merk/Model Type	Jumlah Unit	Ukuran CC	Tahun Pembelian					Asal Usul Cara Perolehan
						Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Mobil Patroli Pengawasan	Toyota Kijang	1 Unit	1783	2002	MHF11KF7010034645	7K-0453339	17 LL	C2480757K	APBD
2	Mobil Pick Up	T. Kijang KF.50	1 Unit		1994	MHF31KF500115993	5K-9245269	8650 AC		APBD
3	Mobil Pick Up	Toyota/Hilux 2,0 M/T	1 Unit	1998	2017	MROEW8BB1H0204420	1TR-A242422	8967AS	MO6924062	APBD
4	Mobil Derek	Hino FG 235 JJ	1 Unit	7684	2012	MJFEG8JJKJG014945	J08EUCJ29658	9813 WC		
5	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1495	2012	MHFE2CJ2JCKO26561	3SZ-DCN8398	111 AJ		
6	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1495	2014	MHFE2CJ2JEKO46912	DER8841	1094 WB		APBD
7	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1495	2014	MHFE2CJ2JEKO48133	DEV6940	1095 WB		APBD
9	Mobil Patroli Perhubungan	Toyota/Vios 1,5 G CVT	1 Unit	1497	2017	MHFB29F31H2007391	2NR-XI29841	1060 WJ	MO6923973	APBD
10	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1496	2019	MHKESFA2JKK006962	2NR F846257			APBD
11	Motor Patroli		1 Unit	200	2009	MHIMC22119KO39332	MC22EI039522	4497 AQ	8651418	APBD
12	Motor Patroli		1 Unit	200	2009	MHIMC22199KO40504	MC22EI039455	4210 AQ	8651417	APBD
13	Speed Boad Pengawasan	YAMAHA	1 Unit	40 HP	2011					APBD
14	Speed Boad Pengawasan	YAMAHA	1 Unit	115 AED	2017					APBD

DAFTAR PRASARANA/ ASET GEDUNG DAN BANGUNAN								
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK								
No	Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan B,KB,RB	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai M2	Letak/ Alamat
		Kode Barang	Register		Bertingkat Tidak	Beton Tidak		
1	Kantor Dishub	01.01.11.04.01	001	B	Bertingkat	Beton	769,5	Jl. Aliyayang Ptk
2	Pos Terminal Batulayang Kantor			KB	Tidak	Beton		Jl. Khatulistiwa Jl.
3	PKB	01.01.11.04.01	001	B	Tidak	Beton	470	Khatulistiwa
4	Dermaga Seng' Hie Pos		001	B	Bertingkat	Beton		Jl. Sultan Muhammad
5	UTD Perparkiran		001	B	Bertingkat	Beton		Jl. Hosokronomoto Jl.
6	Kantor Pelabuhan Penyeberangan		001	B	Tidak	Beton	175m2	Bardan
7	Kantor Pelabuhan Penyeberangan		001	B	Tidak	Beton	112m2	Siantan

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Bidang Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem perkotaan sesuai hirarkhi rencana tata ruang masih belum optimal.
2. Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai sampan bermotor sebagai salah satu angkutan umum sungai dalam wilayah Kota Pontianak.
3. Masih kurangnya penataan dan pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana/fasilitas transportasi sungai bagi masyarakat, yang memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran dalam menuju lokasi yang diinginkan.
4. Peningkatan fungsi pelabuhan penyeberangan yang ada sehingga perlu dilakukan penataan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang menggunakan angkutan penyeberangan.
5. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan tranportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK).
6. Berkembangnya usaha jasa dan kegiatan ekonomi yang begitu pesat, perlu

adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi.

7. Jumlah angkutan umum di Kota Pontianak semakin berkurang, hal tersebut disebabkan berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam untuk mencari solusi angkutan perkotaan serta peningkatan partisipasi/peranserta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi.
8. Kondisi sebagian besar peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan peralatan tua serta kondisi bangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kondisi dan jenis kendaraan saat ini (kendaraan besar dan berbadan tinggi) sehingga pengujian harus dilakukan secara manual yang tentunya berpengaruh pada keakuratan pengujian, sehingga perlu adanya solusi dan inovasi sebagai upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
9. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.
10. Masih kurangnya personil dan tenaga/SDM yang mempunyai keahlian khusus bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor, MRLL, evaluasi andalalin dan pengelolaan perparkiran.
11. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalulintas.
12. Terbatasnya anggaran yang menjadi pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak menyebabkan kurang optimalnya dalam mengalokasikan untuk kegiatan Rutin, kegiatan operasional dan kegiatan Fisik (investasi/sarana prasarana) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun masalah pokok dalam bidang perhubungan di Kota Pontianak dapat dirumuskan sebagai mana tabel berikut ini :

TABEL
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sarana dan Prasarana Transportasi masih belum optimal	1.1. Keterbatasan Penyediaan dan Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan.	1.1.1. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 1.1.2. Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi angkutan sungai dan penyeberangan. 1.1.3. Belum adanya master plan transportasi yang menyeluruh dan terintegrasi. 1.1.4. Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen parkir. 1.1.5. Masih lemahnya partisipasi dan peran serta swasta dalam penyediaan sarana transportasi. 1.1.6. Kurang Optimalnya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.
2.	Kualitas Transportasi yang masih kurang baik	2.1. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan.	2.1.1. Lemahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. 2.1.2. Belum Optimalnya sumberdaya manusia sesuai dengan spesifikasi keahlian bidang perhubungan. 2.1.3. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas. 2.1.4. Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Rencana Pembangunan Daerah/RPD) Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dalam periode RPD ini tidak memuat visi dan misi kepala daerah, melainkan berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah

**“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan
Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”**

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut :

Misi Pertama	Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia
Misi Kedua	Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
Misi Ketiga	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib
Misi Keempat	Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga
Misi Kelima	Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan

Rencana Strategis yang diuraikan pada bab ini adalah Rencana Strategis (RPD) tahun 2024-2026, yang terdiri dari : Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Kebijakan dan Program serta Penanggungjawab Program.

❖ Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan menghasilkan apa.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Target Capaian Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya Kualitas Transportasi Dalam Kelancaran Berlalu Lintas	1. <i>Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota</i>	Jam	0,035
2. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	%	79
3. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	3. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	%	80

Anggaran Tujuan/Sasaran
Dinas Perhubungan Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1. Meningkatnya Kualitas Transportasi Dalam Kelancaran Berlalu Lintas	1. Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota		41.226.408.621
2. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	40.169.775.441
3. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	3. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Pengelolaan Pelayanan	1.056.633.180

Untuk diketahui pada Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025, selain anggaran dari APBD juga mendapat penambahan anggaran dari Dana Insentif Daerah dan Dana Insentif Fiskal dimana peruntukkan kegiatannya adalah kegiatan yang sifatnya investasi yaitu berada pada kegiatan di bidang perlengkapan jalan. Adapun perubahan anggaran tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	Belanja Operasi	50.606.270.482	45.768.997.603
	- Belanja Pegawai	13.982.007.958	10.840.747.502
	- Belanja Barang dan Jasa	36.624.262.524	34.928.250.101
2	Belanja Modal	7.176.967.476	10.391.833.529
Jumlah		57.783.237.958	56.160.831.132

Adapun Capaian Kinerja yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2025 yang akan dinilai dan dituangkan ke dalam LAKIP adalah Sasaran Strategis Pembangunan beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai.

Total anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan tercapainya 2 (dua) sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak di luar sasaran strategis kesekretariatan

sebagaimana dituangkan dalam DPPA Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **41.226.408.621**.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan formal antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Wali Kota yang memuat komitmen kinerja yang harus dicapai dalam satu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. Perjanjian ini disusun sebagai bentuk penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam target kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala OPD.

Melalui Perjanjian Kinerja, Kepala OPD menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan indikator kinerja, target, serta rencana pendanaan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Wali Kota memberikan mandat, arahan, serta dukungan kebijakan agar pelaksanaan kinerja OPD dapat berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta dokumen perencanaan lainnya.

Perjanjian dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Penetapan Kinerja Tahun 2025 merupakan bentuk perjanjian atau kontrak kinerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, serta target kinerja yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Selain itu, perjanjian kinerja juga mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target keluaran (output) dan alokasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan.

Perjanjian kinerja tersebut berfungsi sebagai instrumen yang menjembatani antara Rencana Strategis yang telah ditetapkan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun dan dilaporkan setiap tahun. Dengan adanya perjanjian kinerja ini, keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dapat terwujud secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025. Kedua dokumen tersebut merupakan

dasar pemberian kewenangan kepada Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mengelola anggaran dan melaksanakan program serta kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kota Pontianak

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	79%	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	38.588.133.834
2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	2. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80%	Pengelolaan Pelayaran	1.226.014.980

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kota Pontianak

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	79%	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	40.169.775.441
2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	2. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80%	Pengelolaan Pelayaran	1.056.633.180

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada prinsipnya tidak mengubah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, maupun target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Murni. Sasaran yang tetap dipertahankan meliputi meningkatnya kinerja lalu lintas dan angkutan jalan serta meningkatnya pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan, dengan target masing-masing sebesar 79% dan 80%.

Perubahan yang terjadi lebih difokuskan pada aspek pendanaan sebagai konsekuensi dari penyesuaian anggaran daerah. Pada sasaran meningkatnya kinerja lalu lintas dan angkutan jalan melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, terdapat peningkatan alokasi anggaran dari semula sebesar Rp38.588.133.834 pada Perjanjian Kinerja Murni menjadi Rp40.169.775.441 pada Perjanjian Kinerja Perubahan. Penambahan anggaran ini dimaksudkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan agar target kinerja tetap dapat dicapai secara efektif.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan melalui Program Pengelolaan Pelayaran, terjadi penyesuaian anggaran berupa penurunan alokasi dari Rp1.226.014.980 pada Perjanjian Kinerja Murni menjadi Rp1.056.633.180 pada Perjanjian Kinerja Perubahan. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan efisiensi belanja tanpa mengurangi capaian target kinerja pelayanan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika pengelolaan anggaran, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pontianak tetap sejalan dengan sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah direncanakan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis SKPD. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja SKPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (*outcome*), target kinerja (*output*), realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

1.1 Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,

digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
70 < \bar{x} ≤ 85	= Berhasil
55 < \bar{x} ≤ 70	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja, dengan :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (sesuai Renstra berjalan);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Perhubungan Kota Pontianak telah menetapkan Capaian Kinerja sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU Kota yang dijadikan IKU Dinas adalah sasaran RPJMD atau Tujuan Renstra dengan indikator kinerja rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kota merupakan salah satu indikator capaian keberhasilan Pemerintah Kota Pontianak. Dan IKU Dinas Perhubungan Kota Pontianak dari sasaran strategis yaitu:

- a. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak.
- b. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan.

TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah Meningkatkan Kualitas Transportasi dalam kelancaran berlalu lintas, dengan indikator kinerja utama adalah rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kota.

Analisis Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Utama	Target 2025	Realisasi 2025	%
1.	Meningkatnya Kualitas Transportasi dalam Kelancaran Berlalu Lintas	Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,035 jam	0,038 jam	91,43

Analisa terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 (IKU Kota/Sasaran RPJMD yang menjadi Tujuan Renstra yaitu Meningkatkan Kualitas Transportasi dalam kelancaran berlalu lintas dengan indikator Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Pada tabel Tujuan/Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

1. Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota

Rata-rata waktu tempuh Perjalanan Dalam Kota merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak dalam 1 Km dengan kecepatan tidak melebihi batas kecepatan maksimal yang diijinkan (30 km/jam). Titik pantau yang dijadikan acuan adalah 12 ruas jalan utama yang ada di Kota Pontianak. Rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kota yang ingin dicapai sesuai dengan Target Renstra RPD Dinas Perhubungan 2024-2026 adalah 0,035 jam.

Rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kota di Kota Pontianak berdasarkan rencana dan hasil pengukuran pada tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

RATA-RATA WAKTU TEMPUH PERJALANAN DALAM KOTA

DATA KECEPATAN PERJALANAN TAHUN 2025									
No.	Nama Jalan	Arah Lalu Lintas	Panjang Jalan		Panjang Jalan (terukur)		Kecepatan dan Waktu Tempuh		Rata - Rata Kecepatan Perjalanan
							30 Km / Jam (Hasil Survey)	(Detik)	
1	Jl. Imam Bonjol	Arah Masuk →	1860	Meter	1860	Meter	04;00,00	240	27,90
		Arah Keluar ←					1860	04;00,00	
2	Jl. Adi Sucipto	Arah Masuk →	1500	Meter	1500	Meter	04;00,00	240	22,50
		Arah Keluar ←					1500	04;00,00	
3	Jl. Hasanudin	Arah Masuk →	730	Meter	680	Meter	01;30,00	110	22,25
		Arah Keluar ←					730	01;30,00	
4	Jl. H. Rais A Rahman	Arah Masuk →	2100	Meter	2100	Meter	04;00,00	240	31,50
		Arah Keluar ←					2100	04;00,00	
5	Jl. Husein Hamzah	Arah Masuk →	3819	Meter	3819	Meter	07;00,00	560	24,55
		Arah Keluar ←					3819	07;00,00	
6	Jl. Kom Yos Sudraso	Arah Masuk →	5680	Meter	5680	Meter	14;00,00	750	27,26
		Arah Keluar ←					5680	12;00,00	
7	Jl. Pak Kasih	Arah Masuk →	690	Meter	610	Meter	02;00,00	70	31,37
		Arah Keluar ←					690	02;00,00	
8	Jl. Rahadi Usman	Arah Masuk →	370	Meter	238	Meter	01;00,00	50	17,14
		Arah Keluar ←					370	01;00,00	
9	Jl. Pahlawan	Arah Masuk →	350	Meter	310	Meter	00;30,00	50	22,32
		Arah Keluar ←					350	01;00,00	
10	Jl. Tanjung Pura	Arah Masuk →	2110	Meter	2110	Meter	05;00,00	210	36,17
		Arah Keluar ←					2110	05;00,00	
11	Jl. Ahmad Yani	Arah Masuk →	3360	Meter	2840	Meter	06;00,00	350	29,21
		Arah Keluar ←					3360	06;00,00	
12	Jl. Veteran	Arah Masuk →	690	Meter	565	Meter	01;00,00	90	22,60
		Arah Keluar ←					690	01;00,00	
									26,27

Untuk lebih jelas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran Strategis (Tujuan Renstra RPD) dengan Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota yang merupakan IKU Kota dengan capaian kinerja tahun 2025 adalah **0,038 jam** dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Pengukuran rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam Kota Pontianak pada 12 ruas jalan terpilih yang dapat dianggap mewakili kondisi lalu lintas di Kota Pontianak. Ruas jalan tersebut adalah Jl. Imam Bonjol, Jl. Adi Sucipto, Jl. Hasanudin, Jl. H.RA. Rahman, Jl. Husein Hamzah, Jl. Kom Yos Sudarso, Jl. Pak Kasih, Jl. Rahadi Usman, Jl. Pahlawan, Jl. Tanjungpura, Jl. Ahmad Yani dan Veteran. Ke-12 ruas jalan tersebut memiliki batas kecepatan maksimal yaitu 30 km/jam.

Untuk mengukur waktu tempuh pada ruas jalan terpilih menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{rata-rata jarak tempuh (s)}}{\text{rata-rata kecepatan (v)}} = (t) \text{ jam}$$

$$\frac{1}{26,27} = 0,038$$

$$\begin{aligned} \text{Indikator kinerja} &= \frac{0,035 - (0,038 - 0,035)}{0,035} \times 100\% \\ &= \frac{0,035 - (0,003)}{0,035} \times 100\% \\ &= \frac{0,032}{0,035} \times 100\% \\ &= \underline{91,43\%} \end{aligned}$$

Capaian Kinerja Tahun 2025 pada indikator rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kota yaitu 0,038 jam (2 menit 17 detik). Capaian kinerja ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan target sebesar 0,035 jam (2 menit 6 detik). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Kualitas Transportasi di Tahun 2025 dikategorikan **Sangat Berhasil**. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 91,43%.

Adapun Program yang mendukung adalah :

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

✓ Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

✓ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

✓ Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

✓ Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan

3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

✓ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan

Sub Kegiatan :

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

2. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

✓ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
2. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
3. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

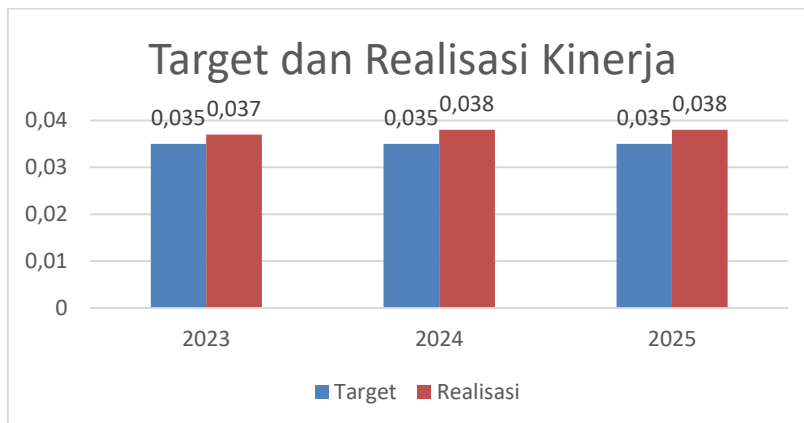
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1.	<i>Meningkatnya Kualitas Transportasi Dalam Kelancaran Berjalan Lintas</i>	<i>Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota</i>	0,035 jam	0,037 jam	0,038 jam	0,038 jam

Berdasarkan data realisasi kinerja dan capaian rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kota dengan target 0,035 jam (2 menit 6 detik). Tahun 2023, 2024 dan 2025 menunjukkan sedikit penurunan kinerja karena lebih lama dari yang direncanakan. Tahun 2025 telah terealisasi 0,038 jam, tahun 2024 masih sama realisasinya 0,038 dan tahun 2023 terealisasi 0,037.

Secara umum, meskipun realisasi waktu tempuh meningkat dari target 0,035 jam menjadi 0,038 jam, namun kenaikan tersebut masih berada dalam batas yang tidak signifikan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dari 951.268 unit pada tahun 2024 menjadi 979.993 unit pada tahun 2025 (sumber: Korlantas Polri) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak mampu

mempertahankan kinerja lalu lintas, meskipun peningkatan jumlah kendaraan tersebut tidak diiringi dengan penambahan kapasitas jalan. Dalam grafik dapat ditampilkan sebagai berikut :



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1.	Meningkatnya Kualitas Transportasi dalam Kelancaran Berlalu Lintas	Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan dalam Kota	0,035 jam	0,038 jam	0,035 jam	91,43

Realisasi kinerja tujuan yaitu rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kota tahun 2025 adalah 0,038 jam dengan target 0,035 jam, menunjukkan adanya deviasi positif atau kinerja yang sedikit di bawah target, meskipun nilainya sangat kecil. Kinerja tidak sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Namun secara umum realisasi kinerja dapat dikatakan berhasil dengan capaian kinerja 91,43% hanya saja perlu ditingkatkan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi 2025	Target Nasional / Daerah Lain
1.	Meningkatnya Kualitas Transportasi dalam Kelancaran Berlalu Lintas	Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan dalam Kota	0,038 jam	-

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak dengan tujuan meningkatnya kualitas transportasi dalam kelancaran berlalu lintas dengan indikator rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kota, tidak terdapat dalam standar nasional. Oleh karena itu analisis capaian kinerja tidak dapat di bandingkan. Demikian juga pada tingkat provinsi, tidak terdapat indikator yang sama. Untuk di tingkat Kabupaten/Kota lainnya juga tidak ada keseragaman indikator dalam mengukur kinerja lalu lintas sehingga tidak ada pembandingan yang dapat dijadikan acuan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendas/ Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Kualitas Transportasi dalam Kelancaran Berjalan Lintas	Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan dalam Kota Realisasi tingkat capaian rata-rata waktu tempuh Perjalanan Dalam Kota adalah 0,038 jam dari target 0,035 jam dengan capaian kinerja 91,43%	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur penghubung yaitu pembangunan dan perbaikan jembatan (jembatan kapuas 1 dan 2) telah membantu memecah kepadatan kendaraan - Optimalisasi manajemen lalu lintas dengan penggunaan teknologi (CCTV), pengaturan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), serta penataan parkir di titik macet membantu melancarkan arus. - Sinergi antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan lalu lintas, khususnya pada titik rawan kemacetan dan kegiatan insidental, berkontribusi terhadap terjaganya kelancaran arus kendaraan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yakni penggunaan lajur sesuai arah dan pembatasan kendaraan berat (truk) pada jam sibuk di jalan-jalan protokol. - Dilakukannya kegiatan pembinaan, pengaturan lalu lintas dan penyelenggaraan perparkiran. - Pengembangan transportasi publik sebagai layanan angkutan massal untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan angkutan umum massal (skema BTS) (subsidi penuh oleh pemerintah) untuk memberikan layanan aman, nyaman dan terjangkau, serta menekan penggunaan kendaraan pribadi. - Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui optimalisasi ATCS (Area Traffic Control System) berbasis teknologi untuk memantau dan mengatur kepadatan secara real-time

Upaya peningkatan kualitas transportasi dan kelancaran berlalu lintas di Kota Pontianak menunjukkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari capaian indikator rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kota yang mencapai 0,038 jam dari target 0,035 jam, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,43 persen. Capaian tersebut didukung oleh pembangunan dan perbaikan infrastruktur penghubung, khususnya Jembatan Kapuas 1 dan Jembatan Kapuas 2, yang berperan dalam memecah kepadatan kendaraan dan memperlancar arus lalu lintas. Selain itu, optimalisasi manajemen lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi seperti CCTV, pengaturan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta penataan parkir pada titik-titik rawan kemacetan turut memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kelancaran arus kendaraan. Sinergi yang baik antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan instansi terkait dalam pengawasan serta penanganan lalu lintas, khususnya pada titik rawan kemacetan dan kegiatan insidental, juga berperan penting dalam menjaga kelancaran lalu lintas.

Sebagai langkah tindak lanjut, diperlukan penguatan alternatif solusi untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, antara lain melalui peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemanfaatan lajur sesuai peruntukan, pembatasan kendaraan berat pada jam sibuk di jalan protokol, serta pelaksanaan rekayasa lalu lintas yang terencana dan berkelanjutan. Pengembangan transportasi publik sebagai layanan angkutan massal juga menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Ke depan, rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain pengembangan angkutan umum massal melalui skema Buy The Service (BTS) yang disubsidi oleh pemerintah agar tercipta layanan transportasi yang nyaman, terjangkau, dan menarik bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui implementasi Area Traffic Control System (ATCS) berbasis teknologi perlu terus dikembangkan untuk memantau dan mengendalikan kepadatan lalu lintas secara real time.

SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Selanjutnya Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak, adalah sebagai berikut :

1) Sasaran I

a. Sasaran I : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Analisis Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	%
1.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	79%	89,09	112,77

Indikator sasaran ini adalah Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas.

Pengukuran tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas menggunakan VC Ratio pada beberapa ruas jalan pendukung menuju jalan utama.

Hasil pengukuran VC Ratio adalah sebagai berikut :

Kinerja Lalu Lintas V/C Ratio Kabupaten/Kota Tahun 2025

No.	Nama Jalan	V/C 2025 Kendaraan
		Kerja
1	Jl. KHW. HASYIM	0,37
2	Jl. JENDERAL URIP	0,66
3	Jl. URAY BAWADI	0,50
4	Jl. SUTAN SYAHRIR	0,65
5	Jl. AMPERA	0,82
6	Jl. PATTIMURA	0,42
7	Jl. 28 OKTOBER	0,70
8	Jl. DR. WAHIDIN	0,61
9	Jl. YA M.SABRAN	0,84
10	Jl. HUSEIN HAMZAH	0,52
	Kinerja Lalu Lintas	0,61

VC Ratio yang ditargetkan untuk tahun 2025 adalah 0,55

$$\begin{aligned} \text{Indikator kinerja} &= \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\% \\ &= \frac{0,55 - (0,61 - 0,55)}{0,55} \times 100\% \\ &= \frac{0,55 - (0,06)}{0,55} \times 100\% \\ &= \frac{0,49}{0,55} \times 100\% \\ &= 89,09\% \end{aligned}$$

Untuk mewujudkan sasaran tersebut pada tahun 2025 dicapai melalui 1 (satu) program dengan 3 (tiga) indikator kinerja program, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator program	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	84 indeks	84,40 indeks	100,5 %	Sangat Berhasil
2	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	86 %	89,17 %	103,68 %	Sangat Berhasil
3	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	83 %	86,30 %	103,98 %	Sangat Berhasil

Indikator kinerja program ini didukung 5 (lima) kegiatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	16 jenis	16 jenis	100	Sangat Berhasil
2	Persentase Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100	Sangat Berhasil
3	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %	100 %	100	Sangat Berhasil
4	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Angkutan Umum	100 %	100 %	100	Sangat Berhasil
5	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir	194 Titik	182 Titik	93,81	Sangat Berhasil
6	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	17.200 unit	6.510 unit	37,84	Tidak Berhasil

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas.

Indikator ini mempunyai target kinerja 84 indeks perlengkapan jalan dan pendukung lalu lintas dan terealisasi 84,40 indeks.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung indikator tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1.) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan target kinerja 16 jenis perlengkapan jalan dan terealisasi 16 jenis perlengkapan jalan yang tersedia. Diantaranya adalah pengadaan dan pemasangan rambu, Pembangunan PJU, pengadaan CCTV pengawas lalu lintas, Pemasangan Jaringan Fiber Optik, Pengecatan Marka Jalan, Pengecatan Zebra Cross, Pengecatan ZoSS, Meterisasi PJU, Peningkatan Traffic Light, Perlengkapan PJU dan Pembayaran Rekening Listrik PJU. Target anggaran kegiatan ini yaitu Rp. 35.139.982.241 dan terealisasi Rp. 34.456.504.638 atau 98,05%.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan indikatornya yaitu:

a.) Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp.4.111.531.980 dan terealisasi Rp.4.043.032.540 atau 98,33%. Untuk target kinerja 289 unit dan terealisasi 289 unit.

Pekerjaan yang terdapat di dalam sub kegiatan ini antara lain :

- Pemasangan jaringan fiber optic, Dokumentasi Proses Penarikan FO di beberapa ruas jalan, antara lain :

Jl. Kom Yos Sudarso



Jl. Pak Kasih



- pengadaan CCTV pengawas lalu lintas

Jl. Sultan Mohammad



Pasar Tengah



- pengadaan dan pemasangan rambu

Batulayang



Budi Utomo



28 Oktober



➤ pengecatan marka parkir

Jl. Dr. Wahidin



Jl. Ampera



➤ pengecatan marka jalan

Jl. Johar



Jl. Gajahmada



➤ pengecatan zebra cross

Jl. Uray Bawadi



Jl. HM. Suwignyo



➤ meterisasi PJU





➤ pengecatan ZoSS.

Jumlah dan lokasi ZoSS yang ada di Kota Pontianak yang masih berfungsi hingga akhir 2025 berjumlah 26 lokasi dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	NAMA LOKASI DAN JALAN	TAHUN PEMBUATAN	KONDISI s.d TAHUN 2025	KET
1.	Depan SMP Negeri 9 Jl. Pangeran Nata Kesuma	2014	Tidak ada	Terkena peningkatan jalan
2.	Depan SD Negeri 17 Jl. Putri Candra Midi	2015	Ada	
3.	Depan SD Bawamai Jl. KH. Ahmad Dahlan	2015	Ada	
4.	Depan SMP Negeri 1 Jl. Jend. Urip	2016	Ada	
5.	Depan SMKN 1 Jl. Danau Sentarum	2016	Tidak ada	Terkena peningkatan jalan
6.	Depan SD Bawari Jl. Merdeka	2016	Ada	
7.	Depan SD Negeri 20 Jl. Suprpto	2016	Tidak ada	Terkena peningkatan jalan
8.	Depan MIN Pal V Jl. Husein Hamzah	2016	Tidak ada	Terkena peningkatan jalan
9.	SMP Negeri 13 Jl. Tebu	2017	Ada	
10.	SMP Negeri 5 Jl. Hasanudin	2017	Ada	Milik Provinsi
11.	SMK Negeri 2 Jl. Khatulistiwa	2017	Tidak ada	Terkena peningkatan jalan
12.	SMP Negeri 10 Jl. WR. Supratman	2018	Ada	
13.	SMP Negeri 16 Jl. Martadinata	2018	Ada	
14.	SD Negeri 31 Jl. Tabrani Ahmad	2018	Ada	
15.	SD Negeri 34 Kec. Pontianak Kota	2019	Tidak ada	Terkena peningkatan jalan
16.	SD Negeri 26 Kec. Pontianak Selatan Jl. S. Parman	2019	Ada	
17.	SMPN 19 Jl. Ampera	2020	Ada	
18.	SDN 35 Pontianak Selatan Jl. Nirbaya	2020	Ada	
19.	Sekolah Kanisius, Sekolah Maranatha, Sekolah Fajar Harapan	2021	Ada	
20.	Sekolah Marie Joseph	2022	Ada	
21.	SMPN.14 Jl. Tani	2022	Ada	
22.	SDN.34 Kemuning	2022	Ada	
23.	SDN 16 Kecamatan Pontianak Utara Jl. SElat Panjang	2023	Ada	
24.	SDN 04 Kec. Pontianak Timur Jl. Panglima Aim	2023	Ada	

NO	NAMA LOKASI DAN JALAN	TAHUN PEMBUATAN	KONDISI s.d TAHUN 2025	KET
25	Depan Pesantren Jl. Pak Benceng (fiskal)	2023	Ada	
26	SD 16 Jl. Tritura (fiskal)	2023	Ada	
27	SDN.28 Jl. Putri Dara Hitam	2024	Ada	
28	SDN.36 Jl. Parit Demang	2024	Ada	
29	SDN.01 Jl. Sei. Raya Dalam Pontianak Tenggara	2024	Ada	
30	MTsN.1 Jl. Alianyang	2025	Ada	
31	SDN.16 Jl. Selat Panjang, Pontianak Utara	2025	Ada	
32	SMPN.04 Pontianak Timur	2025	Ada	



MTsN 1 Jl. Alianyang



SDN.16 Jl. Selat Panjang



SMPN.04 Pontianak Timur

Pengecatan Zona Selamat Sekolah Tahun 2025 dilaksanakan pada 3 lokasi yaitu MTsN.1 Jl. Alianyang, SDN. 36 Jl. Parit Demang, SMPN. 04 Pontianak Timur. *Outcome* dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di kawasan sekolah dengan memberikan peringatan kepada pengendara kendaraan bermotor agar mengurangi kecepatan kendaraan.

b.) *Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Anggaran Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.27.736.831.777 dan terealisasi Rp.27.163.387.032 atau 97,93%. Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1.011 unit dan terealisasi 1.011 unit.

Di dalam Sub kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yaitu :

- Perlengkapan flashing light, perlengkapan traffic light, perlengkapan ATCS/CCTV, perlengkapan rambu, perlengkapan

stiker rambu, peningkatan traffic, perlengkapan penerangan taman, perlengkapan PJU Jalan Lingkungan, perlengkapan PJU Jalan Protokol, perlengkapan amatur LED, dan pembayaran rekening listrik PJU.

c.) *Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Anggaran Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.291.618.484 dan terealisasi Rp. 3.250.085.066 atau 98,73%. Target kinerja sub kegiatan ini adalah 112 unit dan terealisasi 112 unit.

Di dalam Sub kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yaitu :

- pembangunan PJU Jl. Sugiono



- pembangunan PJU Jl. Sepakat 2



- pembangunan PJU Landak



- pembangunan PJU Jl. Husein Hamzah



- pembangunan PJU Jl. Padat Karya



- pembangunan PJU Jl. Pemda Lanjutan



2. Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar

Indikator ini mempunyai target kinerja yaitu 86% dan terealisasi 89,17% atau terealisasi 46 lokasi atas 50 lokasi yang direncanakan dilakukan pemantauan dan penertiban lalu lintas dengan target anggaran Rp. 4.343.689.500 dan terealisasi Rp. 4.297.596.250.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{46 \text{ Lokasi}}{50 \text{ Lokasi}} \times 100\% \\ &= 92\% \end{aligned}$$

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung indikator tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1.) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan Target kinerja adalah 100% dan terealisasi 100% dengan target anggaran Rp. 1.535.243.280 dan realisasi Rp. 1.503.397.343 atau 97,92%.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan indikatornya yaitu:

- a.) *Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 1.368.161.280 dan terealisasi Rp. 1.355.512.093 atau 99,07%.

Untuk target kinerjanya adalah 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.

b.) Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.167.082.000 dan terealisasi Rp. 147.885.250 atau 88,51%. Dengan target kinerja 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.



- 2.) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Angkutan Orang yang tersedia dengan target kinerja 100% BRT (Bus Rapi Transit) dan terealisasi 10 unit BRT. Dengan target anggaran kegiatan sebesar Rp. 973.600.280 dan terealisasi Rp. 973.483.525 atau 99,98%.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan indikatornya yaitu:

a.) Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang tersedia

Bus Rapid Transit (BRT) memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan transportasi umum. Dalam pelaksanaannya, operasional BRT saat ini didukung oleh 10 unit bus tetapi pemakaiannya 7 unit berganti-ganti dari total 10 unit yang tersedia. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan jumlah pengemudi yang aktif, di mana hanya tersedia 7 orang pengemudi, sementara sisanya telah memasuki masa pensiun.

Capaian kinerja pendapatan retribusi pemakaian kendaraan bermotor (BRT) dapat dikatakan sangat berhasil, dari target Rp. 475.000.000 dan terealisasi Rp. 464.400.000 atau 97,77%.

Adapun keberhasilan ini dikarenakan pelayanan yang dilakukan sangat baik, minat masyarakat pengguna BRT banyak, dan tarif masih tergolong murah sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bus BRT difungsikan untuk layanan penyewaan, baik bagi pelajar maupun masyarakat umum. Skema penyewaan ini memberikan fleksibilitas bagi berbagai kelompok pengguna yang membutuhkan transportasi massal untuk kegiatan tertentu, seperti kunjungan edukatif, wisata, atau perjalanan dinas.

Layanan BRT ini bertujuan untuk memberikan akses transportasi yang lebih mudah, aman, nyaman dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta membantu mengurangi kemacetan sehingga dapat meningkatkan ketepatan waktu mereka (pelajar) dalam menghadiri kegiatan belajar mengajar.

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.954.381.000 dan realisasi Rp. 954.273.851 atau 99,98%. Dengan target kinerja 10 unit BRT dan terealisasi 10 unit BRT.



Pada sub kegiatan ini juga dilaksanakan Kajian Evaluasi Kinerja Angkutan Jalan Dan Prasarana (Perencanaan Penerapan Buy The Service Angkutan Perkotaan) dan Kajian Dampak Sosial Perencanaan Penerapan Buy The Service Angkutan Perkotaan dalam rangka mendukung penyediaan BTS (Buy The Service) di tahun 2027.



- b.) *Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.19.219.280 dan terealisasi Rp. 19.209.674 atau 99,95%. Dengan target kinerja 12 laporan dan teralisasi 12 laporan.

- 3.) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan indikator kinerja Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran dengan target 194 titik dan terealisasi 182 titik. Dengan target anggaran Rp. 1.334.845.940 dan realisasi Rp. 1.320.715.382 atau 98,94%.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 910/Dishub/Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Titik Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kota Pontianak, telah dilakukan penyerahan beberapa titik parkir ke BKAD menjadi pajak parkir sehingga sisa titik parkir yang dikelola Dinas Perhubungan sebanyak 182 titik parkir.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan indikator :

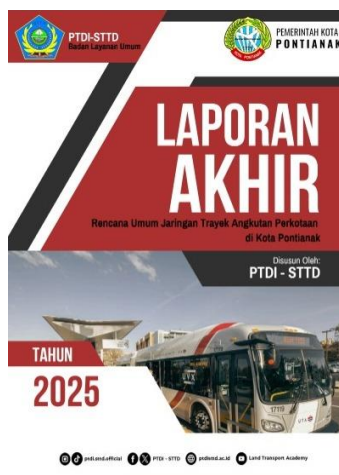
a.) *Jumlah laporan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.1.334.845.940 dan terealisasi Rp. 1.320.715.382 atau 98,94%. Dengan target kinerja 12 laporan dan realisasi 12 laporan.



- 4.) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja persentase penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan target 100% dan terealisasi 100%. Dengan target anggaran Rp.500.000.000 dan terealisasi Rp.500.000.000 atau 100%. Dengan target kinerja 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu dokumen penyusunan tataran transportasi lokal/tatralok dan penyusunan dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan. Penyusunan dokumen

ini dalam rangka mendukung penyediaan BTS (Buy The Service) di tahun 2027.



Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan indikator :

a.) *Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 500.000.000 dan terealisasi Rp. 500.000.000 atau 100%

3. *Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan*

Indikator ini mempunyai target kinerja yaitu 83% dan terealisasi 86,83% dan target anggaran Rp.686.103.700 dan terealisasi Rp.629.100.235 atau 91,69%. Pengukuran realisasi indikator ini adalah perbandingan Jumlah Kendaraan Yang Lulus Kir dengan Jumlah Kendaraan Yang Melakukan Uji Laik Jalan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{6.510 \text{ unit}}{17.200 \text{ unit}} \times 100\% \\ &= 37,84\% \end{aligned}$$

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung indikator tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1.) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji. Dengan target kinerja 17.200 unit kendaraan bermotor yang di uji dan terealisasi 6.510 unit. Dengan target anggaran sebesar Rp.686.103.700 dan realisasi Rp. 629.100.235 atau 91,69%.

Rekapitulasi Jumlah Kendaraan yang Diuji pada
Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2025

TAHUN	TARGET	REALISASI	Capaian %
2014	16.312 Unit	10.401 Unit	63,76
2015	13.299 Unit	12.239 Unit	92,03
2016	15.851 Unit	14.715 Unit	92,83
2017	15.492 Unit	14.139 Unit	91,27
2018	15.870 Unit	12.441 Unit	78,39
2019	15.942 Unit	12.533 Unit	78,62
2020	16.000 Unit	11.236 Unit	70,23
2021	16.300 Unit	11.680 Unit	71,65
2022	16.700 Unit	11.118 Unit	66,57
2023	17.000 Unit	9.942 Unit	58,48
2024	17.000 Unit	9.117 Unit	53,63
2025	17.200 Unit	6.510 Unit	37,84

Realisasi kinerja kegiatan ini tergolong tidak berhasil, dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Kerusakan pada Modul Acces Security (SAM) berupa kartu yang digunakan untuk mengakses sistem penerbitan bukti lulus uji elektronik kementerian perhubungan sehingga perlu dilakukan pengajuan permohonan kembali ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan layanan pengujian kendaraan bermotor.
2. Sertifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor yang telah habis masa berlaku dan telah dilakukan permohonan perpanjangan masa berlaku namun belum dapat ditindaklanjuti oleh kementerian perhubungan sampai dengan batas masa berlaku sertifikat. Oleh karena hal tersebut maka penguji tidak diperkenankan untuk menguji kendaraan sesuai dengan surat dari Kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.502/74/16/DJPD/2025 tanggal 21 Agustus 2025 perihal Surat

Peringatan dan Pemberitahuan Atas Perpanjangan Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka kepada para penguji kendaraan bermotor Dinas Perhubungan untuk dapat mengikuti Diklat Uji Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahap pertama mengikut sertakan 1 (satu) orang penguji kendaraan bermotor Tingkat III yang dilaksanakan di Tegal pada tanggal 11 - 15 Agustus 2025 di Tegal Provinsi Jawa Tengah sampai dengan diterbitkannya sertifikat tertanggal 22 Agustus 2025, sehingga dapat melakukan uji untuk jenis kendaraan tertentu sesuai tingkatan kompetensi. Pada pelaksanaan tahap selanjutnya mengikutsertakan Penguji Kendaraan Bermotor tingkat V yang dilaksanakan pada tanggal 19 - 25 Oktober 2025 di Bali sehingga sampai kepada diterbitkannya Sertifikat Penguji Kendaraan Bermotor Tingkat V pada tanggal 10 November 2025 sehingga dapat melakukan uji terhadap jenis kendaraan sesuai tingkatan jenjang kompetensi. Untuk jenjang kompetensi Tingkat V tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pengujian kendaraan karena dapat menguji kendaraan angkutan tertentu seperti mobil Tangki, Kendaraan Khusus, Tempelan dan gandengan. Pada pelaksanaan diklat kompetensi yang terakhir diikuti adalah diklat untuk uji kompetensi tingkat IV yang dilaksanakan pada tanggal 17 - 20 November 2025 yang dilaksanakan di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah sehingga sampai diterbitkannya Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Tingkat IV pada tanggal 19 November 2025.

3. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor juga mengalami kendala saat terjadi bencana banjir pasang pada tanggal 8 Desember 2025 sehingga menyebabkan peralatan uji kendaraan statis terendam banjir dan memerlukan waktu untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan yang diperlukan kurang lebih 2 (dua) minggu

4. Penetapan target indikator pada tahun 2025 (sesuai Renstra RPD 2024-2026) sebesar 17.200 unit kendaraan dinilai terlalu optimis, sedangkan jumlah kendaraan yang di uji di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pontianak rata-rata pertahun sekitar 12.000 unit sehingga belum sebanding dengan target yang ditetapkan.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan indikatornya yaitu:

a.) *Jumlah sarana dan prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebesar Rp.166.779.200 dan terealisasi Rp.138.728.563 atau 83,18%. Serapan anggaran yang tidak sampai 100% disebabkan karena merupakan efisiensi anggaran yang berasal dari proses negosiasi pengadaan barang dan jasa. Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 2 unit sarana dan prasarana PKB yang terpelihara, dan terealisasi 2 unit diantaranya pemeliharaan alat uji dan pemeliharaan genset.

Pengecatan Alat Uji Cart Lift



sebelum



sesudah

Pemeliharaan Genset



b.) *Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan dengan anggaran Rp.45.439.500 dan terealisasi Rp. 35.855.422 atau 78,90%. Serapan anggaran yang tidak sampai 100% disebabkan karena merupakan efisiensi anggaran yang berasal dari proses negosiasi pengadaan barang dan jasa. Sub kegiatan ini memiliki target kinerja adalah 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.

c.) *Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan anggaran Rp.473.885.000 dan terealisasi Rp.454.516.250 atau 95,91%. Dengan target kinerja 5 unit dan terealisasi 5 unit yaitu kompresor, gas analyzer, smoke tester, computer tablet dan printer smart card.



a.) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	(%)		
1.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	40.169.775.441	39.383.201.123	98,04	112,77	1,96 %

Tabel di atas menampilkan analisa penggunaan sumber daya untuk IKU Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan penjelasan sebagai berikut :

- ❖ Indikator Kinerja Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak yang di dukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan target sebesar Rp. 40.169.775.441 dan terealisasi Rp. 39.383.201.123 atau 98,04%. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 786.574.318 atau 1,95% dari total anggaran program.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel menampilkan analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Analisa untuk masing-masing indikator sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		2025			Ket
			Target	Realisasi	(%)	
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					
	1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16 jenis	16 jenis	100	
		1.1.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	128 unit	128 unit	100	
		1.1.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	374 unit	374 unit	100	
		1.1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2025 unit	2025 unit	100	
	1.2	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	100%	100	

	1.2.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100	
1.3		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	194 titik	182 titik	93,81	
	1.3.1	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	100	
1.4		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	100	
	1.4.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	12 laporan	12 laporan	100	
	1.4.2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	100	
1.5		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100	
	1.5.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	100	
	1.5.2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 unit	10 unit	100	
1.6		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17.200 unit	6.510 unit	37,84	
	1.6.1	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	5 unit	5 unit	100	
	1.6.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 unit	2 unit	100	
	1.6.3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 laporan	12 laporan	100	

❖ Indikator Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak dilaksanakan dengan 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan dan 12 sub kegiatan. Penjelasan untuk tiap-tiap sub kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan target kinerja 16 jenis perlengkapan jalan dan terealisasi 16 jenis perlengkapan jalan. Kegiatan ini di dukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :
 1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

- Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan sub kegiatan :
 1. Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota.
 2. Forum Lalu Lintas dan Angkutran Jalan Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator yaitu jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan 3 sub kegiatan yaitu ;
 1. Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan.

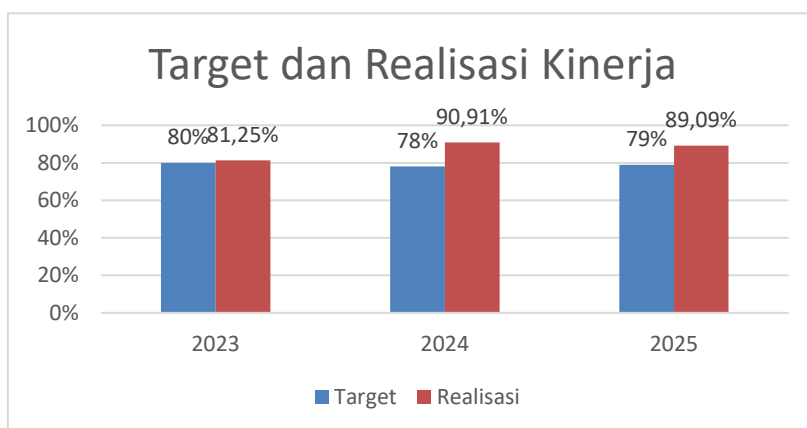
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak.	79%	81,25%	90,91%	89,09%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perbandingan realisasi serta capaian kinerja dengan indikator tingkat kinerja pelayanan kelancaran lalu lintas di Kota Pontianak tahun 2025 terealisasi 89,09% dengan capaian kinerja 112,77% atas target 79%, tahun 2024 dengan target 78% terealisasi 90,91% dengan capaian kinerja 116,55%, sedangkan tahun 2023 dengan target 82%, terealisasi 81,25% dan capaian kinerja 99,09%.

Secara keseluruhan, kinerja ini menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan dan pengaturan transportasi dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi meskipun masih menghadapi tantangan sarana prasarana, dengan upaya peningkatan berkelanjutan melalui penambahan SDM dan perbaikan infrastruktur.

Dalam grafik dapat ditampilkan sebagai berikut:



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat Dalam Dolumen Renstra Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	79	89,09	79	%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra RPD 2024-2026 adalah 79% yakni pencapaian realisasi melebihi target yang menunjukkan keberhasilan strategi yang diterapkan Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Keberhasilan tersebut didukung oleh penyelarasan dan pemutakhiran penyesuaian target dan program kerja sesuai aturan, peningkatan sarana dan prasarana, penambahan personil untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa mendatang.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Nasional
1.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	89,09%	-

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan Sasaran Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan indikator Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak tidak terdapat dalam target nasional dan target provinsi, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan. Demikian juga pada tingkat Kabupaten/Kota lainnya juga tidak ada keseragaman indikator dalam mengukur Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak sehingga tidak ada pembanding yang dapat dijadikan acuan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah dilakukan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	<p>Realisasi sebesar 89,09% dari target 79% dengan capaian kinerja 112,77%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sarana dan prasarana transportasi dengan peningkatan kapasitas jalan, penataan parkir dan peningkatan kualitas prasarana jalan yang terus dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan volume kendaraan. - Perencanaan strategis Dinas Perhubungan dengan penyelarasan dokumen perencanaan dengan kondisi riil di lapangan dan fokus pada target kinerja utama (Indikator Kinerja Utama/IKU) memastikan program kelancaran lalu lintas terlaksana tepat sasaran. - Ketidakseimbangan antara pesatnya pertumbuhan volume kendaraan dan terbatasnya infrastruktur jalan. 	- Manajemen rakayasa lalu lintas, peningkatan infrastruktur dan pengembangan transportasi umum massal	- Peningkatan kinerja lalu lintas (mengurangi Volume/Capacity Ratio) melalui perbaikan infrastruktur, rekayasa lalu lintas dan penataan perparkiran.

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

2) Sasaran II : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Analisis Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	%
1	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	80%	80,56%	100,7

Indikator sasaran strategis ini adalah Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan.

Pengukuran tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan adalah jumlah fasilitas yang tersedia (unit) dibagi jumlah fasilitas sesuai dengan standar (unit).

a. Fasilitas Pokok Pelabuhan Sungai dan Danau

NO.	FASILITAS	ADA/TIDAK ADA
1	Dermaga	Ada
2	lapangan penumpukan	Ada
3	terminal penumpang	Ada
4	fasilitas penampungan dan pengolahan limbah	Ada
5	fasilitas pemadam kebakaran	Ada
6	fasilitas penanganan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3)	Tidak Ada

$$\begin{aligned}
 \text{Kinerja} &= \frac{\text{Fasilitas yang ada}}{\text{Fasilitas yang seharusnya ada}} \times 100\% \\
 &= \frac{5}{6} \times 100\% \\
 &= 83,33 \%
 \end{aligned}$$

b. Fasilitas Pokok Pelabuhan Penyeberangan

NO.	FASILITAS	ADA/TIDAK ADA
1	terminal penumpang	Ada
2	penimbangan kendaraan bermuatan (angkutan barang)	Tidak ada
3	jalan penumpang keluar masuk kapal (gang way)	Ada
4	perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa	Ada
5	fasilitas bunker	Tidak Ada
6	instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi	Ada
7	akses jalan dan atau jalur kereta api	Ada
8	fasilitas pemadam kebakaran; dan	Ada
9	tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal	Ada

$$\begin{aligned} \text{Kinerja} &= \frac{\text{Fasilitas yang ada}}{\text{Fasilitas yang seharusnya ada}} \times 100\% \\ &= \frac{7}{9} \times 100\% \\ &= 77,78\% \end{aligned}$$

Realisasi Pengukuran Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan adalah 80,56% ((83,33%+77,78%)/2) dengan capaian 100,7% atas target 80%.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut pada tahun 2025 dicapai melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) indikator kinerja program, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator program	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Kategori
1	Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	88 %	94,44 %	107,32 %	Sangat Berhasil

Indikator kinerja program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Persentase Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	84 %	100 %	119	Sangat Berhasil
	1.1. Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit	100	Sangat Berhasil
	1.2. Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	12 Laporan	12 Laporan	100	Sangat Berhasil
	1.3 Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	100	Sangat Berhasil

- 2) **Program Pengelolaan Pelayaran**, dengan indikator Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan. Program ini mempunyai target kinerja yaitu 88% dan realisasi 94,44% dengan capaian kinerja adalah 107,32%, dan target anggaran Rp. 1.056.633.180 dan terealisasi Rp. 969.966.230 atau 91,80%.

Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang penjelasan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1.) Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau, dengan indikator Persentase Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau, dengan target kinerja 84% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja 119%. Dengan target anggaran Rp. 1.056.633.180 dan terealisasi Rp. 969.966.230 atau 91,80%.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan indikator sebagai berikut :

- a.) *Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi dan terpelihara*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau dengan anggaran sebesar Rp.678.613.180 dan terealisasi Rp. 618.976.130 atau 91,21%. Dengan target kinerja 5 unit Pelabuhan/dermaga dan terealisasi 5 unit Pelabuhan/Dermaga yang beroperasi dan terpelihara.



b.) *Jumlah laporan pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dengan anggaran sebesar Rp.328.210.000 dan terealisasi Rp. 306.043.300 atau 93,25%. Dengan target kinerja 12 laporan dan terealisasi 12 laporan tahun 2025.



c.) *Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dengan anggaran sebesar Rp.49.810.000 dan terealisasi Rp.44.946.800 atau 90,24%. Dengan target kinerja 1 fasilitas pelayanan dan terealisasi 1 fasilitas pelayanan yaitu pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).



a.) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Program Pengelolaan Pelayaran	1.056.633.180	969.966.230	91,79	91,79	

Tabel di atas menampilkan analisa penggunaan sumber daya untuk IKU Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan penjelasan sebagai berikut :

- ❖ Indikator Kinerja Tingkat kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan dengan target anggaran pada Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp. 1.056.633.180 dan terealisasi Rp. 969.966.230. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.86.666.950 atau 8,20% dari target yang dianggarkan.

b.) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel menampilkan analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Analisa untuk masing-masing indikator sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			2025			Ket
				Target	Realisasi	(%)	
2.	Program Pengelolaan Pelayaran						
	1.1	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		84%	100%	100	
		1.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	5 unit	5 unit	100	
		1.1.2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	12 laporan	12 laporan	100	
		1.1.3	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 unit	1 unit	100	

❖ Indikator Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan dilaksanakan dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Penjelasan untuk tiap-tiap kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu;
 1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau, dengan indikator Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi dan terpelihara 5 unit Pelabuhan/Dermaga.
 2. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau, dengan indikator Jumlah laporan pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau sebanyak 12 laporan. Sub kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan 1 laporan.
 3. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dengan indicator Jumlah fasilitas pelayanan angkutan Pelabuhan sungai dan danau yang tersedia adalah 1 fasilitas.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

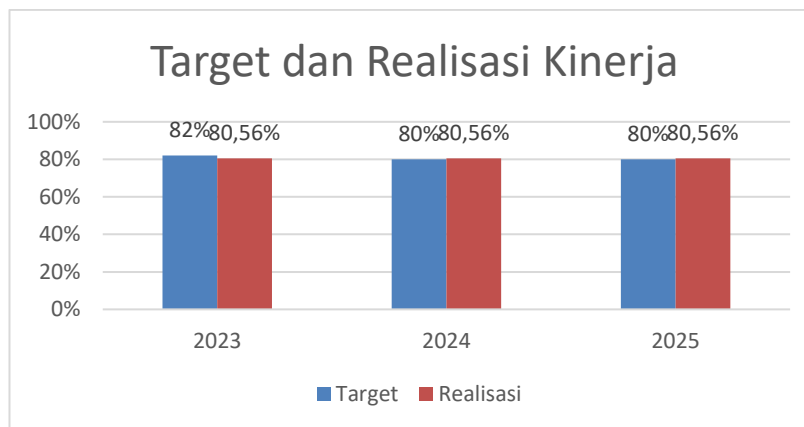
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
2.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80 %	80,56 %	80,56 %	80,56 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perbandingan realisasi serta capaian kinerja dengan indikator tingkat kinerja pelayanan pelabuhan sungai dan dermaga penyeberangan tahun 2025 adalah terealisasi 80,56% dengan capaian kinerja 100,7% atas target 80%, sedangkan tahun 2024 dengan target 80% terealisasi 80,56% dengan capaian kinerja 100,7%. Tahun 2023 dengan target 82% terealisasi 80,56 dengan capaian kinerja 98,24%. Terdapat peningkatan rkinerja pelayanan Pelabuhan sungai dan dermaga

penyeberangan.

Secara keseluruhan, tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan sungai dan dermaga penyeberangan menunjukkan pencapaian yang positif dan komitmen pengelolaan Pelabuhan yang baik dalam mendukung angkutan sungai dan Pelabuhan.

Dalam grafik dapat ditampilkan sebagai berikut:



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Dinas Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
2.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Tingkat Layanan	80	80,56	80	%

Realisasi kinerja pelayanan Pelabuhan sungai dan dermaga penyeberangan tahun 2025 sebesar 80,56% menunjukkan pencapaian yang positif melebihi target rencana strategis 80%. Berarti kinerja pelayanan berhasil mencapai standar yang ditetapkan. Hasil ini bisa menjadi dasar untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas lebih lanjut, serta menjadi bahan evaluasi untuk mengatasi tantangan di masa depan.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Nasional
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80,56%	-

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan Sasaran Meningkatkan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan dengan indikator Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan terealisasi 80,56% atas target 80% di tahun 2025. Tidak bisa dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target nasional dan target provinsi, karena tidak ada target baku untuk indikator tersebut.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan serta Solusi Alternatif Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan (Realisasi sebesar 80,56% dari target 80% dengan capaian kinerja 100,7%)	- Fasilitas yang tersedia di pelabuhan sungai dan penyeberangan dapat difungsikan sesuai peruntukannya - Program/kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun	- Peningkatan pelayanan pelabuhan sungai dan dermaga penyeberangan - Meningkatkan kualitas perencanaan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan	- Peningkatan fasilitas dan infrastruktur baik berupa perbaikan dermaga, optimalisasi sarana. - Penguatan pengawasan, monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan pelabuhan sungai

Penyebab tercapainya kinerja pelayanan Pelabuhan sungai dan dermaga penyeberangan yang diukur dari perbandingan fasilitas Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang tersedia dibagi dengan jumlah fasilitas sesuai dengan standar.

Pengukuran tersebut adalah :

- ◆ Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau, fasilitas yang ada adalah 5 fasilitas yaitu Dermaga, lapangan penumpukan, terminal penumpang, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas pemadam kebakaran hanya 1 fasilitas yang belum tersedia dari fasilitas sesuai standar yaitu fasilitas penanganan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3).

Pengukurannya adalah $5/6 \times 100\% = 83,33\%$.

- ◆ Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan, fasilitas yang ada 7 fasilitas yaitu terminal penumpang, jalan penumpang keluar masuk kapal (gang way), perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, akses jalan dan atau jalur kereta api, fasilitas pemadam kebakaran, tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal. Ada 2 fasilitas yang belum terpenuhi sesuai standar yaitu penimbangan kendaraan bermuatan (angkutan barang) dan fasilitas bunker.

Pengukurannya adalah $7/9 \times 100\% = 77,78\%$

Untuk itu fasilitas Pelabuhan sungai dan danau serta fasilitas Pelabuhan penyeberangan $(83,33\% + 77,78\%) / 2 = 80,56\%$.

Target tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan sungai dan dermaga penyeberangan tahun 2025 adalah 80%, sehingga capaian kerjanya adalah 100,7% dengan kategori sangat berhasil.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025, diketahui besaran anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah sebesar Rp. 56.160.831.132 dengan realisasi sebesar Rp. 54.257.603.825 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan Kota Pontianak TA. 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	40.169.775.441	39.383.201.123	98,04
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	1.056.633.180	969.966.230	91,79
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.934.422.511	13.904.436.472	93,10
	JUMLAH	56.160.831.132	54.257.603.825	96,61

Pada tahun anggaran 2025, anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebesar Rp. 40.169.775.441 dengan realisasi sebesar Rp. 39.383.201.123 sehingga tingkat capaian 98,04%, untuk anggaran Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp. 1.056.633.180 dengan realisasi sebesar Rp. 969.966.230 sehingga tingkat capaian 91,79%, dan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 14.934.422.511 dengan realisasi sebesar Rp. 13.904.436.472 sehingga tingkat capaian 93,10%.

Capaian realisasi belanja anggaran Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Pontianak sesuai tabel di atas adalah 96,61%. Hal ini merupakan keberhasilan kinerja positif dalam penyerapan dana, yang di dukung oleh percepatan pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik. Mayoritas program prioritas telah berjalan sesuai target, dengan efisiensi belanja pegawai dan barang yang tetap terjaga.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025, sesuai dengan bidang tugas Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu memberikan pelayanan yang maksimal di bidang perhubungan serta menata sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis, maka secara umum Dinas Perhubungan Kota Pontianak, telah dapat merealisasi pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanahkan. Adapun pencapaian secara ringkas dapat dilihat sebagaimana berikut :

1. Capaian Kinerja Tujuan **“Meningkatnya Kualitas Transportasi dalam Kelancaran Berjalan Lintas”** yang dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota, dengan target 0,035 jam dan realisasi 0,038 jam dengan persentase capaian 91,43%, dengan kategori **Sangat Berhasil**.
2. Capaian Kinerja Sasaran **“Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”** yang dicapai melalui indikator kinerja yaitu Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak, dengan target 79% dan realisasi 89,09% dengan capaian 112,77% kategori **Sangat Berhasil**.
3. Capaian Kinerja Sasaran **“Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan”** yang dicapai melalui indikator kinerja yaitu Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan, dengan target 80%, realisasi 80,56% dengan persentase capaian 100,7% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai upaya mewujudkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada Tahun 2025 tetap dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Kendala dan permasalahan tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Demikian LAKIP ini kami sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak di masa yang akan datang.



Pontianak, 9 Januari 2026

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

H.Y. Trisna Ibrahim, ST., MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710719 199803 1 007

LAMPIRAN :**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Tahun Anggaran : 2025

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya kelancaran transportasi dalam kelancaran berlalu lintas	Rata-rata kecepatan perjalanan dalam kota (km/jam)	0,035	0,038	91,43
	1.1. Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	79%	89,09%	112,77
	1.2. Meningkatkan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80%	80,56%	100,7

Jumlah Total Anggaran Sasaran Tahun 2025 : Rp. 56.160.831.132

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Tahun 2025 : Rp. 54.257.603.825

Pontianak, 9 Januari 2026

KEPALA PERANGKAT DAERAH,**H.Y. Trisna Ibrahim, ST., MT.****Pembina Utama Muda****NIP. 19710719 199803 1 007**